

BAB I

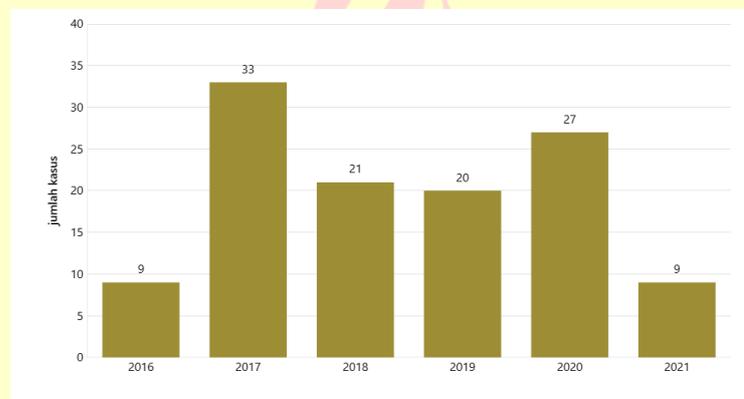
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Dalam pembahasan mengenai sejarah BUMN, penting untuk mengetahui bahwa cikal bakal BUMN telah ada sejak tahun 1973 dengan nama Direktorat Persero dan PKPN. Kemudian, nama tersebut berubah menjadi Direktorat Persero dan BUN. Seiring dengan perkembangan zaman, Direktorat Persero dan BUN terus berkembang pesat. Pada tahun 1993, nama Direktorat tersebut berubah menjadi Direktorat Pembinaan BUMN. Nama dan struktur organisasi ini berubah beberapa kali hingga pada akhir tahun 2001 menjadi organisasi Pembina BUMN. Organisasi ini memiliki fungsi dan tanggung jawab yang setara dengan Kementerian hingga saat ini. Dengan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perusahaan milik negara, Kementerian BUMN memiliki peran penting dalam membantu Presiden mengelola berbagai perusahaan milik negara. (BUMN, 2022).

Sesuai dengan tujuan jangka panjang Kementerian BUMN, BUMN dikategorikan berdasarkan rantai nilai dan ekosistem bisnis untuk meningkatkan keberlanjutan komersial mereka. Saat ini terdapat empat puluh satu perusahaan multinasional yang terbagi dalam dua belas klaster. Dalam mengelola berbagai sektor bisnis mereka, BUMN bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kegiatan mereka dilakukan secara transparan dan akuntabel. catatan keuangan BUMN adalah sumber daya penting yang menawarkan pandangan komprehensif tentang kinerja operasional dan keuangan mereka. catatan keuangan tahunan sebuah perusahaan menyajikan ikhtisar kondisi finansial, performa, dan perubahan yang terjadi selama periode tertentu. catatan tersebut mencakup catatan arus kas, laba rugi, neraca, serta data relevan lainnya (Silvi, 2024).

Di BUMN, korupsi masih menjadi hal yang umum terjadi. Sebanyak 340 orang telah didakwa antara tahun 2016 dan 2021, sementara 119 kasus korupsi BUMN sedang dalam proses penyidikan, menurut Indonesia Corruption Watch (ICW, 2022). Kerugian negara dari kasus-kasus tersebut diyakini mencapai Rp47,92 triliun. Kasus korupsi di BUMN bagaikan penyakit kronis yang tak kunjung sembuh. Sejak tahun 2016, jumlah kasus terus meningkat, bahkan tak terpengaruh oleh masa pandemi COVID-19. Pada tahun 2021, penegak hukum masih disibukkan dengan 9 kasus pelanggaran di BUMN.



Gambar 1.1 Jumlah Kasus Korupsi BUMN 2016-2021

Modus korupsi yang paling sering terjadi di BUMN adalah catatan fiktif. Sepanjang tahun 2016 hingga 2021, ICW mendokumentasikan 23 kasus korupsi dengan modus ini. Selain itu, terdapat 12 kasus korupsi yang melibatkan proyek-proyek fiktif, selain 18 kasus dugaan penggelapan, penyalahgunaan anggaran, dan penyuapan. Melihat banyaknya kasus korupsi di tubuh BUMN, ICW meminta pemerintah untuk memperluas peran komisararis BUMN dalam mengelola proyek-proyek besar. ICW mendesak pemerintah untuk mengangkat komisararis yang memiliki integritas, profesionalitas, dan kecakapan yang tinggi untuk menghilangkan budaya koruptif di tubuh BUMN (ICW, 2022).

Dalam kasus dugaan korupsi terkait penyalahgunaan fasilitas pembiayaan beberapa bank oleh PT. Waskita Karya (Persero) Tbk. dan PT Waskita Beton Precast, Tbk., Direktur Utama PT Waskita Karya (Persero) Tbk, Destiawan Soewardjono (DES), telah ditetapkan sebagai tersangka, menurut Ketut Sumedana,

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Destiawan diduga menggunakan dokumen fiktif untuk memesan dan menyetujui pelepasan uang *supply chain financing* (SCF) yang melanggar hukum untuk melunasi kewajiban perusahaan dan menyalahgunakan dana tersebut guna memodalkan proyek fiktif. (KOMPAS, 2023).

BEI telah menerima penjelasan dari PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA) mengenai dugaan manipulasi catatan keuangan perusahaan. Direktur Penilaian Perusahaan BEI, I Gede Nyoman Yetna, menyatakan bahwa karena rinciannya bersifat rahasia dan masih dalam tahap negosiasi, maka perusahaan harus memberikan penjelasan secara tertutup. Nyoman menambahkan bahwa mereka meminta WIKA untuk menyediakan penjelasan kepada publik melalui Keterbukaan Informasi Bursa (KOMPAS, 2023).

Audit berlapis tidak mampu menjamin pelaporan keuangan di bursa saham, seperti yang ditunjukkan oleh kasus manipulasi catatan keuangan oleh PT Waskita Karya Tbk serta PT Wijaya Karya Tbk. Kasus ini bermula setelah publik melihat catatan keuangan kedua perusahaan BUMN tersebut yang dipublikasikan di BEI. Proses peninjauan catatan keuangan perusahaan perlu diperkuat untuk memastikan keakuratan dan transparansi. Kelemahan dalam sistem ini, seperti yang ditunjukkan dalam contoh, dapat berakibat pada skandal keuangan dan hilangnya kepercayaan publik. Diperlukan langkah-langkah untuk memperkuat peran komite audit, meningkatkan akuntabilitas dewan komisaris independen, dan meningkatkan transparansi.

Mengukur kinerja keuangan sangat penting untuk mengoptimalkan operasi. Bisnis yang meningkatkan kinerja operasional mereka cenderung melihat tingkat pertumbuhan keuangan yang lebih tinggi serta peningkatan daya saing karena peningkatan efektivitas dan efisiensi. Selain mengukur keberhasilan keuangan, analisis juga dilakukan. Metrik tertentu, sering kali rasio atau indeks yang menghubungkan data keuangan, digunakan sebagai tolok ukur untuk mengevaluasi kinerja keuangan perusahaan. Dalam menganalisis rasio keuangan, terdapat dua jenis perbandingan yang dapat dilakukan: satu antara perusahaan dan perusahaan

lain yang memiliki karakteristik yang sebanding, dan yang lainnya antara rasio untuk perusahaan yang sama di masa lalu, sekarang, atau masa depan (Siregar, Cahyadi, Igamo, Nurdiawansyah, & Saggaf, 2022).

Banyak faktor, termasuk likuiditas, profitabilitas, aktivitas, *leverage*, besaran perusahaan, penjualan, dewan komisaris *independent* serta komite audit, yang bisa memengaruhi keberhasilan keuangan perusahaan. Likuiditas dan profitabilitas merupakan indikator penting yang saling terkait dan harus dijaga keseimbangannya oleh perusahaan. Perusahaan yang likuid dan profitable mempunyai kesempatan yang lebih luas guna menggapai kesuksesan pada jangka panjang. *Leverage* menunjukkan jumlah utang yang digunakan untuk mendanai operasi, sedangkan aktivitas menunjukkan seberapa efektif aset digunakan. Meskipun lebih banyak penjualan menunjukkan potensi perusahaan untuk menghasilkan lebih banyak pendapatan, ukuran perusahaan dapat mempengaruhi akses ke sumber daya (Thompson, 2018). Tanggung jawab utama komite audit adalah memberikan akuntabilitas dan transparansi dalam pelaporan keuangan; namun, penggunaan *leverage* dapat mempengaruhi risiko dan stabilitas (Smith, 2020). Pemilihan variabel yang tepat dalam analisis keuangan perusahaan sangatlah penting guna memperoleh gambaran yang tepat mengenai kesehatan keuangan perusahaan. Variabel ini membantu investor, kreditor, dan pihak berkepentingan lainnya dalam membuat keputusan yang tepat dan memantau kinerja perusahaan dari waktu ke waktu.

Sesuai dengan Surat Edaran No. SE-03/PM/2000 dari BAPEPAM, yang sekarang dikenal sebagai OJK, Komite Audit didirikan di Indonesia pada tahun 2001. Pada tahun 2002, dikeluarkan Keputusan Menteri BUMN No. Kep-117/MBU/2002, yang mengatur peran pendukung Komite Audit bagi Dewan Komisaris/Dewan Pengawas. Karena berdampak pada akuntabilitas dan transparansi pelaporan keuangan perusahaan, variabel komite audit sangat penting untuk mempelajari kinerja keuangan bisnis. Komite audit yang efektif dapat menurunkan bahaya pelanggaran atau kecurangan, menjamin kepatuhan terhadap standar akuntansi, dan meningkatkan kualitas audit internal dan eksternal. Investor

dan pemegang saham dapat merasa lebih yakin akan keakuratan catatan keuangan perusahaan jika komite auditnya kuat. Untuk menilai dampak faktor komite audit terhadap akuntabilitas, transparansi, dan ketergantungan catatan keuangan perusahaan, analisis kinerja keuangan sering kali memasukkan faktor tersebut (Chen, 2019).

Total aset, jumlah karyawan, dan pendapatan tahunan adalah beberapa cara untuk mengukur ukuran perusahaan. Dalam riset mengenai kinerja keuangan, variabel ukuran perusahaan sering digunakan untuk menilai hubungannya dengan profitabilitas, risiko keuangan, dan kemampuan perusahaan untuk bertahan di pasar yang kompetitif. Ukuran perusahaan dapat dijadikan indikator stabilitas keuangan dan tingkat pertumbuhan perusahaan. Oleh karena itu, variabel ukuran perusahaan sangat penting dalam analisis kinerja keuangan karena dapat membantu memahami dampaknya terhadap profitabilitas, risiko keuangan, dan kemampuan perusahaan untuk bertahan dalam pasar yang kompetitif (Thompson, 2018).

Variabel *leverage* menunjukkan jumlah utang yang digunakan perusahaan untuk mendanai aktivitasnya. *Leverage* sering dianggap sebagai isu penting dalam studi kinerja keuangan karena berdampak pada struktur modal, risiko keuangan, dan kinerja bisnis secara keseluruhan. Di tengah ekonomi yang bergejolak, *leverage* tinggi bagaikan pedang bermata dua. Di sisi lain, ia menawarkan kesempatan untuk meningkatkan keuntungan secara signifikan. Di sisi lain, ia juga membawa risiko keuangan yang substansial dan berpotensi memperparah ketidakstabilan. Sebaliknya, jumlah *leverage* yang rendah dapat menjadi tanda kondisi keuangan yang baik, tetapi juga dapat menghambat kapasitas organisasi untuk melakukan ekspansi dan investasi (Kim, 2020).

Menurut penelitian Dawarti, et al. (2021) Tidak terdapat korelasi dengan ukuran perusahaan dengan kinerja keuangan, dan komite audit, dewan direksi, serta dewan komisaris tidak berdampak kepada kinerja keuangan. Sementara itu, studi Fitriyati, et al. (2021) mengindikasikan bahwasanya komite audit dan besaran bisnis tidak berdampak kepada kinerja keuangan, tetapi *leverage* serta likuiditas berdampak kepada kinerja keuangan. Perolehan yang didasarkan pada studi

sebelumnya mengindikasikan adanya ketidaksesuaian dalam cara variabel independen mempengaruhi kinerja keuangan. Untuk itu, diperlukan pengujian dan analisis lebih lanjut untuk menganalisis “Pengaruh Komite Audit, Ukuran Perusahaan, serta *Leverage* kepada Kinerja Keuangan pada BUMN”.

1.2. Pertanyaan Penelitian

Tiga pertanyaan penelitian dibuat oleh peneliti berdasarkan konteks latar belakang berikut:

- a) Apakah komite audit memberikan pengaruh kepada kinerja keuangan BUMN?
- b) Apakah ukuran Perusahaan memberikan pengaruh kepada kinerja keuangan BUMN?
- c) Apakah *leverage* memberikan dampak kepada kinerja keuangan BUMN?

1.3. Tujuan Penelitian

Studi ini dilaksanakan dengan maksud guna:

- a) Menganalisis serta menguji dampak komite audit kepada kinerja keuangan BUMN.
- b) Menganalisis serta menguji dampak ukuran perusahaan kepada kinerja keuangan BUMN.
- c) Menganalisis serta menguji dampak *leverage* kepada kinerja keuangan BUMN.

1.4. Manfaat Penelitian

Studi ini besar harapan bisa menyampaikan manfaat kepada berbagai aspek berikut:

- a) Manfaat Praktis
 1. Dengan menganalisis pengaruh komite audit, besaran perusahaan, serta *leverage* kepada kinerja keuangan, studi ini dapat membantu BUMN dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan mereka dan mendapatkan kepercayaan dari publik dan investor.

2. Pemerintah dapat menggunakan informasi ini untuk membuat kebijakan keuangan yang lebih efektif yang akan meningkatkan kinerja keuangan BUMN.

b) Manfaat Teoritis

1. Diantisipasi bahwa penelitian ini akan menjadi literatur warisan yang dapat dibaca pembaca dan yang dapat diperiksa untuk studi lebih lanjut.
2. Bukti empiris mengenai dampak *variable independent* kepada *variable dependent* diantisipasi guna ditunjukkan oleh studi ini.

